

DAFTAR PUSTAKA

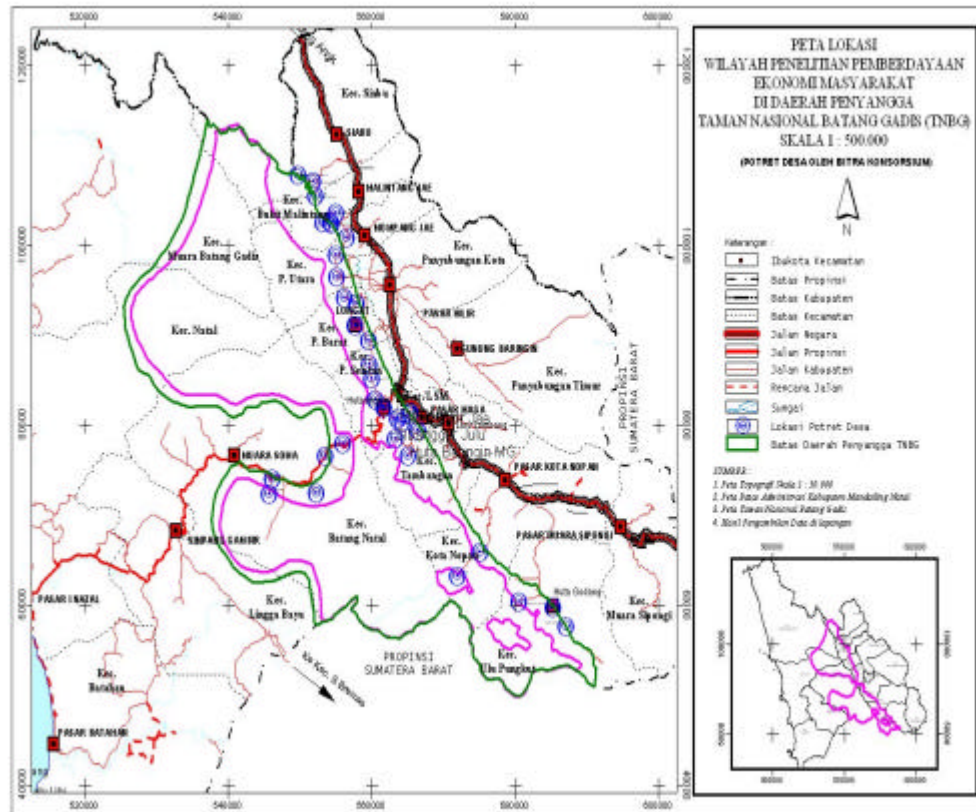
- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Agung S. 2004. *Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*. CSF. Kalimantan
- Alam S. 2005. *Pengembangan Usaha Perikanan Berbasis Komunitas (Studi Kasus pada Komunitas Nelayan Tappang Kelurahan Pontap Kecamatan Waru Utara Kota Palopo)*. Tesis tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Awang S. 2003. *Politik Ekonomi Kehutanan*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Anonim. 2005. *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis Tahun 2006-2030*. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara II. Medan.
- Cornelis dan Mir. 2003. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. BPEE. Yogyakarta. Edisi Pertama
- Departemen Kehutanan. 2000. *Pedoman Survei Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia. Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI*. Jakarta.
- _____. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Kehutanan 2006-2025*. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Departemen Kehutanan 2005-2009 (Penyempurnaan)*. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2006. *Bahan Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi IV DPR RI. Rancangan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Berwawasan Agribisnis Tahun 2006..* Jakarta.
- Direktur Jenderal Pembangun Daerah. 1999. *Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta

- Djajono. 2006. *Peran Sektor Kehutanan dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Majalah Kehutanan Indonesia Edisi II. Jakarta.
- Effendi, R. dan T. Wahyuni. 2002. *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar hutan Melalui Pengembangan Hutan Rakyat di Kalimantan Timur*. Jurnal Sosial Ekonomi Volume 3 Nomor 1 Tahun 2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor. Halaman 67 – 79
- Emil Salim. 1996. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Fatoni. 2004. *Tingkat dan Manfaat Partisipasi dalam Program Pengembangan Kecamatan (Studi Kasus di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)*. Tesis tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Hikmat H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press (HUP). Bandung.
- Husaini dkk. 2002. *Model Pengembangan Kegiatan Ekonomi Produktif Berwawasan Lingkungan Bagi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Kabupaten Bengkulu Utara*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Ikhsan E dkk. 2005. *Dari Hutan Rarangan ke Taman Nasional : Potret Komunitas Lokal di Sekitar Taman Nasional Batang Gadis*. USU Press. Medan.
- Khazali dkk. 2002. *Kajian Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Mangrove (Studi Kasus di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat)*. Jurnal Pesisir dan Lautan (*Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources*) Vol. 4 No. 3
- Kuncoro M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Kuswanda dkk. 2005. *Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Daerah Penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh Propinsi Jambi*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam (*Journal of Forest and Nature Conservation Research*) Vol II No. 6
- Kuswanda dkk. 2006. *Potensi Masyarakat dan Peranan Kelembagaan di Zona Penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh Propinsi Riau*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam (*Journal of Forest and Nature Conservation Research*) Vol III No. 4

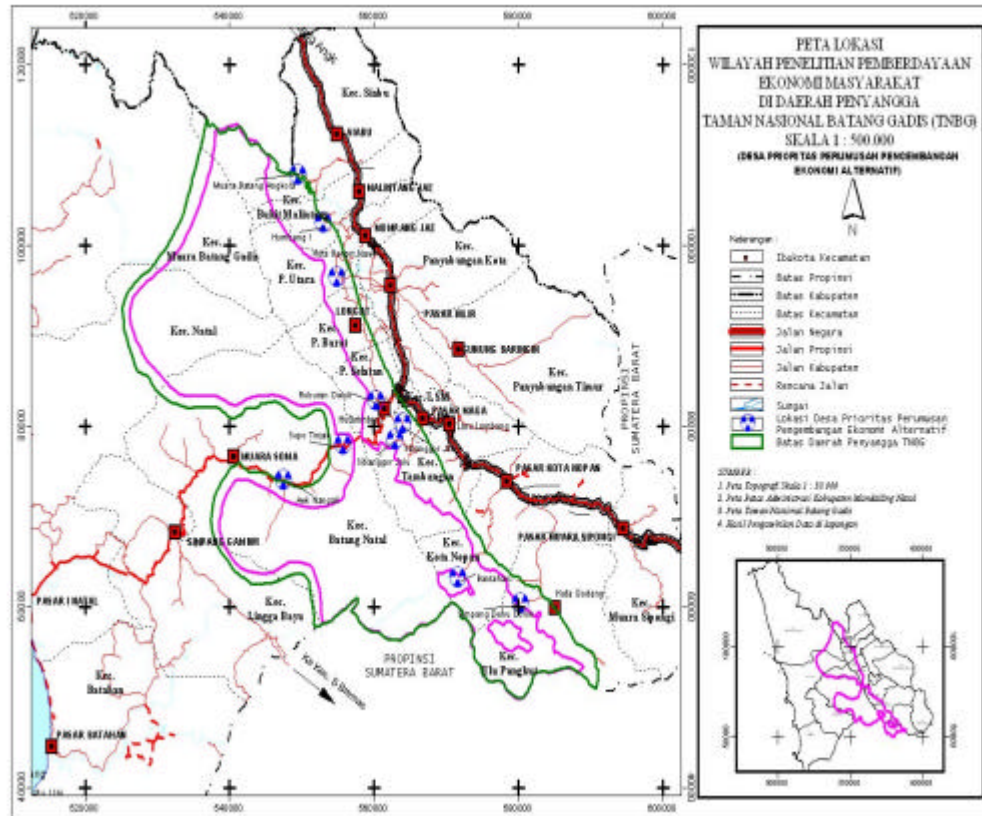
- Mardi Y. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Pokok Pikiran pada Seminar Sehari Pemberdayaan yang diselenggarakan Bappenas, 6 Maret 2000. Jakarta.
- Melati, P dan Hariyatno D. 2004. *Potensi Pengembangan Pola Usata Wanatani di Desa Cilampuyang, Kabupaten Garut*. Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2004. Pusa Penelitian dan Pengembangan sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor.
- Narayan, Deepa. 2002. *Empowerment and Poverty Reduction*. World Bank Washington DC.
- Ndraha, Talizidzuhu. 2000. *Desa Masa Depan : Garis Depan Demokrasi (dalam Angger Jati Wijaya dkk. Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurfatriani, F. dan T. Puspitojati. 2002. *Manfaat Ekonomis Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat di Pulau Jawa*. Jurnal Sosial Ekonomi Volume 3 Nomor 1 Tahun 2002. Pusat Penelitian dan Pengembangan sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor. Halaman 35-45.
- Pranaka, A.M.W dan Vidyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranaka. Pemberdayaan : Konsep Kebijakan dan Implementasi)*. Center For Strategic and International Studies (CSIS). Jakarta
- PSKMP-UNHAS. 2002. *Participatory Local Social Development Planning (PLSDP : Modul I Konsep dan Kerangka Pembangunan Sosial Lokal Partisipatoris)*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rahmawaty. 2004. *Penanggulangan Kerusakan Terumbu Karang Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Kelautan*. USU-Press. Medan
- Republik Indonesia, 1990, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jakarta.
- _____, 1997, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 49/Kpts/DJ-VI/1997 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Daerah Penyangga. Jakarta.
- _____, 1998, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Jakarta.

- _____, 1999, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta.
- _____, 2002, *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Riduwan dan Kuncoro. 2006. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Alfabeta. Bandung
- Salman. 2005. *Pembangunan Partisipatoris. Modul Konsentrasii Manajemen Perencanaan, Program Studi Manajemen Pembangunan*. Makassar.
- Soehartono. 1995. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Cetakan I. Yogyakarta.
- Soetrisno L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius. Jakarta.
- Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia. Jakarta.
- Zubayir. 2005. *Kajian Model Social Forestry di Daerah Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat*. Tesis tidak dipublikasikan. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang.

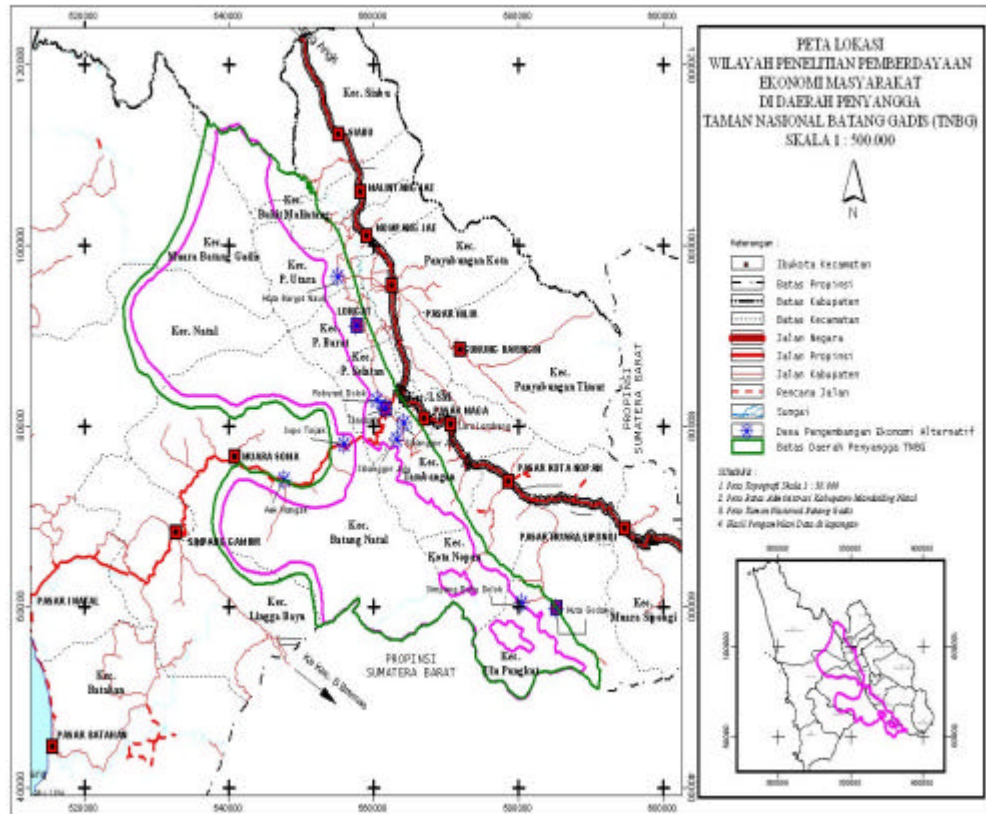
Lampiran 1a. Peta Lokasi Wilayah Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Penyangga TNBG Propinsi Sumatera Utara (Potret 35 Desa oleh Bitra Konsorsium)



Lampiran 1b. Peta Lokasi Wilayah Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Penyangga TNBG Propinsi Sumatera Utara (Perumusan Alternatif Pengembangan Ekonomi pada 10 Desa Prioritas)



Lampiran 1c. Peta Lokasi Wilayah Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Penyangga TNBG Propinsi Sumatera Utara (Implementasi Alternatif Pengembangan Ekonomi pada 10 Desa Penerima Dana Bergulir)



Lampiran 3. Daftar Pertanyaan (Wawancara Mendalam) untuk Menjawab Tujuan Penelitian Pertama

Daftar Pertanyaan (Wawancara Mendalam) untuk :

I. BITRA KONSORSIUM

1. Menanyakan secara detail gambaran Bitra Konsorsium, visi dan misinya, program-programnya, keterkaitannya dengan pengembangan TN. Batang Gadis dan potret umum dari aktivitasnya (dimintakan profil Bitra Konsorsium)
2. Apa awal pemikiran Bitra Konsorsium melakukan program untuk mengembangkan ekonomi alternatif di daerah ini
3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam merumuskan program tersebut (dirinci dari mulai awal sampai terbentuk program)
4. Bagaimana proses penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan
5. Program apa yang telah dihasilkan
6. Apa tujuan utama dari program tersebut
7. Apakah program tersebut diselenggarakan untuk menghindari masyarakat melakukan aktivitas terhadap kawasan TN. Batang Gadis
8. Apakah program tersebut diharapkan untuk mendukung kelestarian TN. Batang Gadis
9. Apakah program tersebut mendukung kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat selama ini atau memang program yang baru
10. Bagaimana cara Bitra Konsorsium untuk menjelaskan rencana tersebut kepada masyarakat (misalnya sosialisasi, pertemuan-pertemuan atau yang lainnya)
11. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap rencana tersebut
12. Apakah Bitra Konsorsium mengalami kesulitan dalam menemukan program yang dibutuhkan oleh masyarakat
13. Bagaimana menanggulangi sekiranya ada kesulitan
14. Bagaimana posisi Bitra Konsorsium dalam perumusan program tersebut
15. Setelah program tersebut ditemukan apakah kembali dilakukan penjelasan kepada masyarakat
16. Langkah apa yang diambil oleh Bitra Konsorsium dalam implementasi program tersebut
17. Bagaimana proses implementasi program pengembangan ekonomi masyarakat tersebut
18. Apakah terdapat permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya (mohon dijelaskan lebih rinci).
19. Setelah diimplementasikan apakah Bitra Konsorsium tetap mendampingi (terus memberikan pembinaan)
20. Bagaimana intensitas pembinaan yang dilakukan oleh Bitra Konsorsium
21. Hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi program tersebut
22. Bagaimana upaya Bitra Konsorsium dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan program
23. Dalam perumusan dan implementasi program, selain masyarakat setempat siapa lagi yang dilibatkan.
24. Bagaimana peran masing-masing yang terlibat tersebut menurut Bitra Konsorsium

25. Sekedar evaluasi, apakah peran masing-masing telah dijalankan sesuai dengan rencana
26. Apa hambatan yang ditemui oleh Bitra Konsorsium dalam proses pelibatan tersebut.

II. KEPALA BALAI TN. BATANG GADIS

1. Apa program Balai TN. Batang Gadis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga TN. Batang Gadis tersebut
2. Apakah Balai TN. Batang Gadis diikutkan oleh Bitra Konsorsium dalam merumuskan serta mengimplementasikan program dimaksud, seperti apa bentuknya
3. Bagaimana posisi dan peran Balai TN. Batang Gadis dalam pengembangan ekonomi tersebut
4. Apa tanggapan Balai TN. Batang Gadis terhadap program Bitra Konsorsium
5. Apa saran Balai TN. Batang Gadis terhadap Bitra Konsorsium selaku pelaksana program
6. Dari kacamata Balai TN. Batang Gadis apakah program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah penyangga TN tersebut
7. Jika tidak sesuai, mengapa, dan apa solusi yang ditawarkan

II. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

1. Apakah ada program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kesadaran masyarakat di sekitar kawasan hutan sebelum Bitra Konsorsium datang
2. Program apa saja yang telah dilaksanakan, bagaimana hasilnya dan hambatan apa yang ditemui dalam implementasinya
3. Apakah Dinas Kehutanan diikutkan oleh Bitra Konsorsium dalam merumuskan serta mengimplementasikan program dimaksud, seperti apa bentuknya
4. Bagaimana posisi dan peran Dinas Kehutanan dalam pengembangan ekonomi tersebut
5. Apa tanggapan Dinas Kehutanan terhadap program Bitra Konsorsium
6. Apa saran Dinas Kehutanan terhadap Bitra Konsorsium selaku pelaksana program
7. Dari kacamata Dinas Kehutanan apakah program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah penyangga TN tersebut
8. Jika tidak sesuai, mengapa, dan apa solusi yang ditawarkan

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Penyangga TNBG Propinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Pengembangan Ekonomi Alternatif oleh Bitra Konsorsium)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Umur : Tahun
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan Pokok :
 Pendidikan Terakhir :
 Desa :

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENJAWAB TUJUAN PENELITIAN KEDUA :
 UNTUK MENGETAHUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
 EKONOMI YANG DILAKUKAN

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PERENCANAAN

1. Apakah Bitra Konsorsium telah melakukan pengamatan terhadap kebutuhan Bapak/Ibu dalam pengembangan ekonomi sebelum melakukan rapat/pertemuan?
 A. Ya
 B. Tidak
2. Apakah Bitra Konsorsium menginformasikan adanya rapat/pertemuan kepada Bapak/Ibu?
 A. Ya
 B. Tidak
3. Apakah telah dilakukan rapat/pertemuan selanjutnya untuk membahas pengembangan ekonomi yang akan dilaksanakan setelah diadakan pengamatan?
 A. Ya
 B. Tidak
4. Apakah Bapak/Ibu menghadiri rapat/pertemuan tersebut?
 A. Ya
 B. Tidak

5. Apakah Bapak/Ibu diberikan kesempatan untuk mengajukan usul/pendapat tentang jenis ekonomi yang dibutuhkan menyangkut peningkatan pendapatan pada saat rapat tersebut?
- A. Ya
 - B. Tidak

Pertanyaan lanjutan :

Apa usul Bapak/Ibu saat itu :

6. Dalam menetapkan kegiatan pengembangan ekonomi yang akan dilakukan, apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam menentukan prioritas jenis ekonomi yang akan dikembangkan?
- A. Ya
 - B. Tidak
7. Apakah pendapat Bapak/Ibu dalam menentukan prioritas jenis ekonomi yang akan dikembangkan menjadi pertimbangan dari Bitra Konsorsium dalam menentukan prioritas tersebut?
- A. Ya
 - B. Tidak

Pertanyaan lanjutan :

Apa pendapat Bapak/Ibu saat itu :

8. Apakah Bapak/Ibu ikut menyepakati jenis ekonomi yang akan dikembangkan oleh Bitra Konsorsium?
- A. Ya
 - B. Tidak
9. Setelah jenis kegiatan ekonomi ditetapkan, kemudian Bapak/Ibu diminta oleh Bitra Konsorsium menyampaikan data dan informasi yang diperlukan, apakah Bapak/Ibu memberikannya?
- A. Ya
 - B. Tidak

PERTANYAAN TAMBAHAN

1. Apa alasan Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat/pertemuan tersebut
 - A. Ikut teman
 - B. Disuruh
 - C. Ingin mengetahui apa yang akan dihasilkan dalam rapat tersebut
 - D. Ingin mengetahui apa kegiatan pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Bitra Konsorsium
 - E. Lainnya,
(sebutkan)

2. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak/Ibu saat itu?
 - A. Diberikan bantuan berupa modal
 - B. Diberikan pelatihan berupa keterampilan bercocok tanam atau lainnya
 - C. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TN. Batang Gadis
 - D. Lainnya,

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PELAKSANAAN

1. Apakah program yang telah dihasilkan dalam rapat/pertemuan, itu juga yang dilaksanakan oleh Bapak/Ibu?
 - A. Ya
 - B. Tidak
 Pertanyaan lanjutan :
 Jika berbeda, jelaskan perbedaannya :

2. Apakah dalam pelaksanaan program Bapak/Ibu dilibatkan?
 - A. Ya
 - B. Tidak
 Pertanyaan lanjutan :
 Bagaimana bentuk keterlibatan Bapak/Ibu

3. Apakah dalam pelaksanaan program, Bapak/Ibu memberikan sumbangan misalnya uang, tenaga, pikiran dan yang lainnya?
 - A. Ya
 - B. Tidak
 Pertanyaan lanjutan:
 Apa bentuk sumbangan Bapak/Ibu yang lainnya :

4. Apakah keterlibatan Bapak/Ibu sukarela?
A. Ya
B. Tidak
Pertanyaan Lanjutan:
Keterlibatan seperti apa :

5. Apakah Bapak/Ibu juga terlibat dalam pengawasan/kontrol pelaksanaan program?
A. Ya
B. Tidak
Pertanyaan Lanjutan :
Pengawasan/kontrol yang Bapak/Ibu lakukan seperti apa :

6. Apakah Bapak/Ibu memberikan kritik selama program dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan pelaksanaan?
A. Ya
B. Tidak
Pertanyaan Lanjutan :
Kritik yang Bapak/Ibu lakukan :

7. Apakah dalam kegiatan administrasi Bapak/Ibu juga terlibat?
A. Ya
B. Tidak
Pertanyaan Lanjutan :
Keterlibatan yang Bapak/Ibu lakukan seperti apa :

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PEMANFAATAN HASIL

1. Apakah Bapak/Ibu telah menikmati hasil dari program yang dilaksanakan?
A. Ya
B. Belum
Pertanyaan lanjutan :
Hasil apa yang Bapak/Ibu peroleh :

2. Apakah dengan adanya program tersebut telah mampu meningkatkan semangat kerja Bapak/Ibu dari sebelumnya?
 - A. Ya
 - B. Belum

3. Apakah hasil dari program tersebut juga telah mampu mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak Bapak/Ibu terutama dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan?
 - A. Ya
 - B. Belum

Pertanyaan lanjutan:

Hasil apa yang Bapak/Ibu rasakan dapat mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak tersebut :

4. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan pengaturan dan pemeliharaan terhadap apa yang dihasilkan dalam program tersebut? (menyangkut aset atau bahan lainnya)
 - A. Ya
 - B. Belum

Pertanyaan Lanjutan :

Apa aset yang dihasilkan dalam program tersebut :

5. Setelah program selesai dilaksanakan dan Bitra Konsorsium telah meninggalkan program tersebut untuk selanjutnya Bapak/Ibu mengelolanya, apakah Bapak/Ibu melakukan kegiatan selanjutnya secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya?
 - A. Ya
 - B. Belum

Pertanyaan Lanjutan :

Jika tidak bersama-sama bagaimana kelanjutan pelaksanaan program tersebut :

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP EVALUASI

1. Apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu butuhkan?
 - A. Ya
 - B. Tidak

Pertanyaan lanjutan :

Jika Tidak, apa sebenarnya program yang Bapak/Ibu butuhkan :

2. Apakah seluruh rencana sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh?
 - A. Ya
 - B. TidakPertanyaan lanjutan :
Jika tidak, dalam hal apa tidak tercapai :

3. Apakah program yang sudah dilaksanakan sudah mampu memperbaiki kehidupan Bapak/Ibu?
 - A. Ya
 - B. TidakPertanyaan lanjutan:
Perbaiki kehidupan apa yang Bapak/Ibu peroleh :

4. Apakah dengan adanya program tersebut telah meningkatkan pendapatan Bapak/Ibu?
 - A. Ya
 - B. TidakPertanyaan lanjutan :
Berapa pendapatan Bapak/Ibu dari program tersebut?

Berapa biaya produksi yang Bapak/Ibu keluarkan?
5. Setelah program selesai, apakah dilakukan kembali rapat/pertemuan oleh Bitra Konsorsium untuk penilaian program tersebut (semacam evaluasi)?
 - A. Ya
 - B. Tidak

6. Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam evaluasi tersebut?
 - A. Ya
 - B. Tidak

7. Apakah aspirasi Bapak/Ibu diterima oleh Bitra Konsorsium dalam evaluasi yang dilakukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program berikutnya?
 - A. Ya
 - B. TidakPertanyaan Lanjutan :
Aspirasi apa yang Bapak/Ibu tawarkan :

8. Apakah Bapak/Ibu diberikan tanggung jawab oleh Bitra Konsorsium dalam melanjutkan program tersebut?

A. Ya

B. Tidak

Pertanyaan Lanjutan :

Tanggung jawab Bapak/Ibu seperti apa :

Pertanyaan tambahan untuk masing-masing Ketua OKR pada 3 desa contoh :

Bagaimana pandangan Ketua OKR terhadap keberadaan OKR di desa tersebut dan apa kepentingan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya OKR tersebut.

KUTIPAN WAWANCARA

1. Kutipan wawancara dengan Ketua OKR Desa Simpang Duhu Dolok :

“Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan TNBG selalu melibatkan masyarakat melalui OKR ini, sehingga kami mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan kami juga selalu diikutkan dalam pelaksanaannya. OKR ini memang sangat penting bagi kami” (*wawancara tanggal 8 Juni 2007*).

2. Kutipan wawancara dengan Ketua OKR Desa Roburan Dolok :

“Terbentuknya OKR di desa kami mendorong masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan masa lalu yaitu penebangan liar atau *illegal logging* yang sering dilakukan oleh sebagian penduduk desa. Sekarang dengan adanya informasi tentang bahaya yang diakibatkan oleh kebiasaan tersebut melalui penyuluhan yang diadakan oleh OKR Kabupaten mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan hutan. Kami akan berusaha menjaga kelestarian hutan agar terhindar dari bencana alam yang menimpa desa kami, apalagi pembentukan OKR di desa kami juga mempunyai program mensejahterakan masyarakat dengan pengembangan potensi pertanian. Harapan kami semoga pemerintah tidak hanya menyelamatkan hutan semata, tapi juga menyelamatkan masyarakat melalui program pengembangan potensi alam maupun potensi lainnya seperti pertanian dan peternakan” (*wawancara tanggal 11 Juni 2007*).

3. Kutipan wawancara dengan Ketua OKR Desa Sibanggor Jae :

“Walaupun desa kami tidak berbatasan langsung dengan TNBG, namun dengan dibentuknya OKR ini memberikan pengetahuan baru bagi kami dalam penjagaan kawasan hutan. Dengan demikian masyarakat secara sadar melakukan pencegahan terhadap siapapun yang merusak hutan terutama mereka yang membawa kayu yang lewat di desa kami. Selain itu OKR juga berupaya untuk mengenali apa kebutuhan dari warga kaitannya dengan peningkatan pendapatan. Semakin besarnya animo masyarakat dalam pencegahan pengrusakan hutan menjadikan desa kami menerima penghargaan dalam kategori pelestarian hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, walaupun jauh dari batas kawasan hutan” (*wawancara tanggal 18 Juni 2007*).

4. Kutipan wawancara dengan Bitra Konsorsium (Koordinator Lapangan):

“Pada dasarnya kami juga mengharapkan desa yang menjadi penerima bantuan dana bergulir dari Bitra Konsorsium adalah desa yang telah dilakukan *rapid assesment*, namun desa tersebut ternyata dalam mengajukan proposalnya tidak sesuai dengan harapan dari Bitra Konsorsium sehingga kami mengembalikannya. Dana bergulir yang akan dicairkan sudah siap dan kami tidak boleh menahan dana tersebut, sehingga beberapa OKR Desa kami hubungi untuk mengajukan proposal pengembangan ekonomi alternatif. Desa-desa yang terakhir mengajukan proposal ini ternyata memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KSUK dan Bitra Konsorsium” (Timbul Panggabean, wawancara tanggal 4 Juni 2007).

5. Kutipan wawancara dengan peserta (Ketua OKR Desa Simpang Duhu Dolok):

“Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Bitra Konsorsium melalui OKR di desa kami, turut mendorong semangat masyarakat untuk memikirkan upaya dalam mengembangkan pertanian. Kami mempunyai lahan yang cukup luas per KK dan sumberdaya yang banyak, tetapi selama ini kami sulit mengolahnya karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan yang kami miliki (Parlagutan Lubis, wawancara tanggal 9 Juni 2007)”

6. Kutipan wawancara dengan seorang peserta di Desa Sibanggor Jae :

“Sebenarnya kami sudah mengusulkan agar kegiatan ini dilakukan sebelum pertengahan tahun mengingat musim hujan di desa ini terjadi sekitar September. Namun Bitra Konsorsium mencairkan dana bergulir sekitar September (musim hujan), sehingga tanaman kami banyak yang rusak. Padahal program ini sangat berarti bagi kami karena selama ini belum pernah ada program pengembangan ekonomi yang selalu didampingi dengan pelatihan-pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Bitra Konsorsium” (Fadil Nasution, wawancara tanggal 20 Juni 2007).

7. Kutipan wawancara dengan Koordinator Bitra Konsorsium (koordinator lapangan) :

“Target kami dalam pengembangan ekonomi alternatif ini adalah bagaimana tercipta sebuah keberdayaan pada masyarakat dalam peningkatan perekonomiannya. Kami memulai kegiatan ini dari

sekelompok orang yang nantinya dapat menjadi contoh pada keluarga lainnya. Walaupun bantuan yang digulirkan kecil secara fisik namun keberlanjutan programnyalah yang menjadi tujuan kami. Terlepas dari adanya kegagalan di lapangan, hal tersebut menjadi pelajaran bagi pengembangan selanjutnya” (wawancara tanggal 23 Juni 2007).

8. Kutipan wawancara dengan peserta di Desa Simpang Duhu Dolok :

”Pengembangan ekonomi alternatif saat ini telah mendorong kami untuk mengembangkan komoditi ini sebagai upaya kami untuk meningkatkan pendapatan, karena hasil yang kami peroleh ternyata mampu menambah pendapatan kami” (Parlagutan Lubis, wawancara tanggal 25 Juni 2007)

9. Kutipan wawancara dengan Koordinator Bitra Konsorsium Medan (Yusriwati) :

”Program tersebut bukan semata untuk menghindarkan masyarakat dari aktivitas terhadap kawasan TNBG, tapi lebih kepada penyadaran soal arti pentingnya sebuah kawasan konservasi, tentang manfaat hutan jika lestari. Masyarakat sekitar hutan alam adalah pemangku kepentingan utama sebuah kawasan hutan. Jika hutan rusak, masyarakatlah yang akan menerima akibatnya, demikian juga sebaliknya, jika hutan lestari masyarakat juga yang akan menerima manfaatnya” (wawancara tanggal 28 Juni 2007).

10. Kutipan wawancara dengan Kepala Balai TNBG (Ir. Syahgiman Siregar) dan Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal (Ir. Cardy) :

”Bitra Konsorsium sangat peduli dengan keberadaan masyarakat yang ada di desa-desa sekitar TNBG dan kami sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh mereka. Namun alangkah lebih baik apabila dalam mengembangkan ekonomi alternatif tersebut kami juga diikutsertakan sehingga terjalin sinergi dalam pelaksanaannya. Kami juga mempunyai konsep dalam pengembangan ekonomi alternatif dan Bitra Konsorsium sudah melaksanakannya, jadi apabila hal tersebut disinergikan pasti akan lebih berhasil dibandingkan dengan pencapaian saat ini” (wawancara tanggal 26 Juni 2007).

PERBAIKAN TESIS HASIL SEMINAR (23 Juli 2007)

Saran Bapak Dr. Ir. Sumbangan Baja, M. Sc

1. Konseptual Perbaikan Ekologi (Konteks Tujuan Penelitian ke 3) Pada tesis (Hal 131) ada pernyataan :

Biaya tersebut meliputi pembabatan, pembersihan lahan, pembuatan bedengan, plastik mulsa, pembelian bibit cabe, penanaman bibit, pemupukan dasar hingga pemupukan sampai hasil.

Justifikasi :

Kegiatan pembabatan dan pembersihan lahan dilakukan pada lahan milik masyarakat yang tadinya merupakan lahan terlantar (bukan pada kawasan hutan). Pengembangan ekonomi alternatif yang dilaksanakan pada saat ini merupakan tambahan dari usaha ekonomi yang selama ini dilaksanakan, dengan memanfaatkan lahan masyarakat yang terlantar (responden yang ada di Desa Simpang Duhu Dolok), namun ada juga responden menggunakan lahan yang selama ini dipakai untuk kegiatan pertanian, sehingga dengan lamanya waktu dari perumusan hingga implementasi maka responden tersebut menggunakan lahan yang ada untuk kegiatan pertanian.

Kondisi yang ada :

Kegiatan Pengembangan ekonomi alternatif yang dilaksanakan oleh Bitra Konsorsium kaitannya dalam mendukung kelestarian lingkungan (TNBG) merupakan tujuan utama sesuai dengan tujuan jangka panjang Bitra Konsorsium yaitu penyelamatan TNBG seluas 108.000 hektar yang menjadi bagian dari hutan alam Angkola seluas 400.000 hektar yang menjadi rumah bagi satwa-satwa endemis seperti Harimau Sumatera. Hal ini juga terlihat dari jenis ekonomi alternatif yang ramah terhadap lingkungan yaitu hortikultura (cabe, kacang tanah dan kedelai) di Desa Simpang Duhu Dolok dan Desa Sibanggor Jae serta kegiatan pembibitan karet di Desa Roburan Dolok. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memupuk kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian TNBG.

Penambahan Konseptual Perbaikan Ekologi pada Tesis (Tambahan pada sub bab Rekomendasi dan Implikasi Kebijakan) :

Pengembangan ekonomi alternatif dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan ruang pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya karena upaya pelestarian TNBG bermuara pada pola pengelolaan masyarakat

disekitarnya yang salah satunya adalah pembangunan bidang ekonomi dan sosial masyarakat yang memperhatikan aspek ekologi (lingkungan). Pengembangan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan masyarakat, sehingga keselarasan kebutuhan dan daya dukung lingkungan dapat tercipta. Pemikiran dalam penemuan ekonomi alternatif selanjutnya juga hendaknya memperhatikan karakteristik lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian TNBG. Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah penyangga TNBG dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan utama adalah memberikan alternatif usaha yang secara ekonomi menguntungkan dan secara ekologi ramah terhadap lingkungan. Hal ini akan sesuai dengan salah satu indikator dari keberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Hidayati (1999) dalam Khazali dkk. (2002). Memperhatikan berbagai hal tersebut, maka konsep pengembangan ekonomi alternatif yang ditawarkan adalah konsep *ecodevelopment* seperti yang ditawarkan oleh Husaini dkk. (2002) di Taman Nasional Kerinci Seblat. Konsep ini merupakan konsep pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan pelestarian lingkungan. Wawasan pentingnya adalah bahwa sumberdaya alam yang ada di sekitar daerah penyangga TNBG hendaknya dikelola dengan bijaksana agar dapat terselenggara pembangunan jangka panjang yang akan menuntun ke arah perbaikan mutu kehidupan masyarakat yang lebih tinggi dari generasi ke generasi. Dalam implementasinya perlu diperhatikan 3 unsur yang sangat kuat mempengaruhi konsep tersebut (Emil Salim, 1996 dalam Husaini dkk. 2002) yaitu cara sumber digunakan, cara teknologi dikembangkan dan cara perbaikan mutu kehidupan masyarakat.

2. Tunjukkan Proses Tabel 15

Masyarakat mempersiapkan lahan dengan luas ± 0.4 ha per KK, dimana menurut 7 responden lahan tersebut merupakan lahan yang selama ini belum pernah dimanfaatkan secara intensif. Sementara 2 responden menyisihkan 0,4 ha lahannya untuk pengembangan ekonomi tersebut dari lahan yang selama ini digunakan. Untuk lahan yang selama ini masih terlantar, maka perlu dilakukan pembabatan dan pembersihan lahan sehingga layak untuk ditanami. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Pebruari 2006 dan telah siap tanam. Namun bantuan dana bergulir baru dicairkan pada bulan September 2006, sehingga 2 responden tidak menggunakan dana tersebut karena lahan yang seharusnya digunakan telah dialihkan untuk komoditi lainnya. Sementara 7 responden kemudian melakukan penanaman sesuai dengan komoditas yang diinginkan sebagaimana tertera pada Tabel 15. Perlu diketengahkan disini bahwa selama proses tersebut berjalan, OKR desa berfungsi optimal melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan minimal sekali dalam satu bulan. Pertemuan tersebut membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta upaya pemecahannya, namun tidak terbatas hanya pada pengembangan ekonomi

alternatif yang dilaksanakan. Pada bulan Maret 2007 masyarakat telah menikmati hasil, namun tidak seluruhnya. Ada 2 responden yang mengalami kerugian karena ternyata komoditas yang dipilih (kentang) tidak memberikan hasil yang optimal. Namun secara keseluruhan hasil yang diperoleh masyarakat cukup berhasil.

Apabila dilakukan akumulasi terhadap hasil yang diperoleh seluruh peserta (9 orang), maka diperoleh besarnya pendapatan yaitu Rp. 17.131.000 dengan bantuan modal yang diberikan sebesar Rp. 7.360.000. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh OKR dengan memperhitungkan sewa lahan dan biaya yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi alternatif tersebut, maka untuk 1 ha diperlukan biaya Rp. 2.050.000. Dengan demikian untuk 3,6 ha diperlukan biaya kurang lebih sebesar Rp. 7.380.000.

Berdasarkan hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 11.397.600 (6 bulan) yang apabila dihitung per bulan terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.997.500 (perhitungan untuk seluruh hasil yang diperoleh). Namun dalam administrasi OKR besarnya pendapatan tetap tertulis sebesar Rp. 17.131.000, karena masyarakat tidak memperhitungkan biaya yang seharusnya dikeluarkan (misalnya biaya per ha sebesar Rp. 2.050.000).

Selanjutnya oleh OKR langsung dilakukan pengembalian dana Bitra Konsorsium sebesar Rp. 5.210.000 dan sisanya Rp. 2.150.000 akan dikembalikan pada hasil panen tahap kedua. Untuk pengembangan ekonomi alternatif tahap kedua, maka dipergunakan dana yang masih sisa saat ini (Rp. 11.921.000) terutama untuk membiayai 2 responden yang belum menggulirkan dana pada tahap pertama. Sisa uang tersebut merupakan pengurangan hasil panen (Rp. 17.131.000) dengan dana pinjaman yang telah dikembalikan (Rp. 5.210.000). Dana tersebut tidak semuanya dipergunakan untuk pengembangan ekonomi alternatif tahap kedua, namun dilakukan juga pembayaran untuk sisa hasil usaha (5% untuk OKR Kabupaten, 5% untuk KSUK dan 2% untuk OKR Desa) dan sebagian lagi diberikan kepada anggota sesuai dengan hasil yang diperoleh masing-masing.

Perhitungan penguatan pendapatan pada 2 desa lainnya yaitu Desa Sibanggor Jae dan Desa Roburan Dolok tidak dilakukan karena hasil yang diperoleh masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut belum ada. Kegiatan pengembangan ekonomi alternatif yang dilaksanakan di Desa Sibanggor Jae mengalami kegagalan, sementara di Desa Roburan Dolok masih berlangsung hingga saat ini.

Tabel 15 Penguatan Pendapatan di Desa Simpang Duhu Dolok, Kecamatan Ulu Pungkut

No	Responden	Komoditi	Luas Lahan PEA (Ha)	Besar Bantuan (Rp)	Pendapatan Sebelum PEA (Rp/Bulan)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Pendapatan 6 Bulan (Rp)	Pendapatan Bersih 6 Bulan (Rp)	Tambahan Pendapatan per/bulan (Rp)
1	Parlagutan Lubis	Cabe	0,4	960.000	975.000	820.000	3.605.000	2.785.000	464.150
2	Munawar Pulungan	Kacang Tanah	0,4	500.000	675.000	820.000	1.080.000	260.000	43.000
3	Nazaruddin Pulungan	Kentang	0,4	900.000	650.000	820.000	1.000.000	180.000	30.000
4	Ali Akbar Lubis	Kentang	0,4	900.000	700.000	820.000	450.000	(370.000)	-
5	Jamonang Lubis	Kentang	0,4	900.000	650.000	820.000	600.000	(220.000)	-
6	Fahrudin Matondang	Cabe	0,4	900.000	750.000	820.000	5.300.000	4.486.600	747.750
7	Marzuki Lubis	Cabe	0,4	900.000	650.000	820.000	5.096.000	4.276.000	712.600
8	Nazamuddin Lubis	-	0,4	900.000	875.000	820.000	-	-	-
9	Abdul Hadi Lubis	-	0,4	500.000	1.050.000	820.000	-	-	-
Jumlah			3,6	7.360.000	6.975.000	7.380.000	17.131.000	11.921.000	1.997.500 (Pembulatan)

Sumber : Diolah dari Data Hasil Pelaksanaan Lapangan, 2007

3. **Pencantuman nama responden (identitas responden) pada lampiran 2, telah memperoleh persetujuan dari responden.**
4. **Benang Merah Tujuan Penelitian ke 3 dengan Metodologi dan Pembahasan**

Penambahan pada Metodologi Penelitian khususnya teknik analisis data (Hal 49-52) adalah sebagai berikut :

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terjadi dilihat dari 4 indikator (mengacu pada pendapat Mardi Y, 2000 dan Hidayati, 1999 *dalam* Khazali dkk., 2002) yaitu :

1. Penguatan Pemilikan Faktor-Faktor Produksi, yang dilihat dari pemilikan lahan masyarakat serta bantuan modal yang ada.
2. Penguatan Kelembagaan, yang dilihat dari apakah telah terbentuk kelembagaan ditingkat desa yang mengelola ekonomi alternatif yang dikembangkan.
3. Penguatan Pendapatan, yang dilihat dari pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pengembangan ekonomi alternatif dilaksanakan.
4. Penguatan Pengetahuan, Informasi dan Keterampilan, yang dilihat apakah telah dilakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan kegiatan lain oleh Bitra Konsorsium kaitannya dalam pemupukan pengetahuan, penambahan informasi serta peningkatan keterampilan masyarakat.

5. **Perbaiki Judul (Bahasa Inggris)**

***THE EMPOWERMENT OF COMMUNITY ECONOMY AT BATANG
GADIS NATIONAL PARCK BUFFER ZONE NORTH SUMATERA
(A CASE STUDY ON THE ALTERNATIVE ECONOMY COMMUNITY
DEVELOPMENT BY BITRA KONSORSIUM)***

Saran Ibu Dr. Nursini, SE., MA

- 1. Kesalahan teknis (salah ketik) telah diperbaiki dalam tesis**
- 2. Kategori Pengembangan Ekonomi Alternatif (Hal 93) dibuat dalam bentuk tabel dengan membuat indikator masing-masing.**

Hasil Perbaikan :

Tabel 2. Kategori dan Indikator Pengembangan Ekonomi Alternatif Hasil Implementasi Lapangan

No	Kategori	Desa	Indikator
1	Sudah Berhasil	Simpang Duhu Dolok	<ul style="list-style-type: none"> ? Terlaksananya kegiatan pengembangan ekonomi alternatif di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bitra Konsorsium melalui OKR dan KSU Konservasi yang telah terbentuk ? Keberhasilan dalam menggulirkan kembali dana bantuan pada tahap II ? Peningkatan pendapatan dari peserta program pengembangan ekonomi alternatif ? Kesesuaian dari ekonomi alternatif dengan kebutuhan masyarakat
2	Gagal	Sibanggor Jae, Tano Bato, Longat, Huta Godang dan Sopo Tinjak	<ul style="list-style-type: none"> ? Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan ekonomi alternatif di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bitra Konsorsium melalui OKR dan KSU Konservasi yang telah terbentuk ? Ketidakberhasilan dalam menggulirkan kembali dana bantuan pada tahap II ? Tidak terciptanya peningkatan pendapatan dari peserta program pengembangan ekonomi alternatif ? Ketidaksesuaian ekonomi alternatif dengan kebutuhan masyarakat
3	Sedang Berjalan	Roburan Dolok, Huta Bargot Nauli, Aek Nangali dan Sibanggor Julu	<ul style="list-style-type: none"> ? Kegiatan pengembangan ekonomi alternatif masih berlangsung di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OKR dan KSU Konservasi ? Belum sepenuhnya dilakukan pemanenan

Sumber : Diolah dari Data Hasil Pelaksanaan Lapangan, 2007

3. Beberapa informasi tidak ditemukan dalam daftar pertanyaan misalnya luas lahan, pendapatan sebelum dan sesudah per bulan

Luas lahan milik masyarakat diperoleh dari monografi desa (data sekunder) dan luas lahan untuk pelaksanaan pengembangan ekonomi alternatif diperoleh dari dari Bitra Konsorsium, sementara pendapatan sesudah program telah ditanyakan pada pertanyaan untuk menjawab tujuan penelitian ke dua (Hal 170).

Berdasarkan hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 11.397.600 (6 bulan) yang apabila dihitung per bulan terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.997.500 (perhitungan untuk seluruh hasil yang diperoleh) dengan rincian masing-masing responden sebagaimana pada Tabel 15. Namun dalam administrasi OKR besarnya pendapatan tetap tertulis sebesar Rp. 17.131.000, karena masyarakat tidak memperhitungkan biaya yang seharusnya dikeluarkan (misalnya biaya per ha sebesar Rp. 2.050.000).

Tabel 15 Penguatan Pendapatan di Desa Simpang Duhu Dolok, Kecamatan Ulu Pungut

No	Responden	Komoditi	Luas Lahan PEA (Ha)	Besar Bantuan (Rp)	Pendapatan Sebelum PEA (Rp/Bulan)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Pendapatan 6 Bulan (Rp)	Pendapatan Bersih 6 Bulan (Rp)	Tambahan Pendapatan per/bulan (Rp)
1	Parlagutan Lubis	Cabe	0,4	960.000	975.000	820.000	3.605.000	2.785.000	464.150
2	Munawar Pulungan	Kacang Tanah	0,4	500.000	675.000	820.000	1.080.000	260.000	43.000
3	Nazaruddin Pulungan	Kentang	0,4	900.000	650.000	820.000	1.000.000	180.000	30.000
4	Ali Akbar Lubis	Kentang	0,4	900.000	700.000	820.000	450.000	(370.000)	-
5	Jamonang Lubis	Kentang	0,4	900.000	650.000	820.000	600.000	(220.000)	-
6	Fahrudin Matondang	Cabe	0,4	900.000	750.000	820.000	5.300.000	4.486.600	747.750
7	Marzuki Lubis	Cabe	0,4	900.000	650.000	820.000	5.096.000	4.276.000	712.600
8	Nazamuddin Lubis	-	0,4	900.000	875.000	820.000	-	-	-
9	Abdul Hadi Lubis	-	0,4	500.000	1.050.000	820.000	-	-	-
Jumlah			3,6	7.360.000	6.975.000	7.380.000	17.131.000	11.921.000	1.997.500 (Pembulatan)

Sumber : Diolah dari Data Hasil Pelaksanaan Lapangan, 2007

- 4. Beberapa informasi penting dari hasil pertanyaan tetapi tidak diulas dalam pembahasan (misalnya hampir semua pertanyaan untuk Bitra Konsorsium tidak ada)**

Jawaban hasil wawancara dengan responden telah dirangkum untuk menjawab tujuan penelitian pertama mengenai perumusan dan implementasi pengembangan ekonomi alternatif.

Saran Bapak Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc.

- 1. Koreksi salah ketik (Hal 11,13) telah diperbaiki dalam tesis**
- 2. Kelengkapan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Hal 141)**

Hasil Perbaikan :

Membuat Tabel Peranan Tim Kolaborasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Penyangga TNBG

Tabel 16. Peranan Tim Kolaborasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Daerah Penyangga TNBG

No	Tim Kolaborasi TNBG	Peranan
1.	Departemen Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ? Melakukan koordinasi secara vertikal dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi terutama yang berhubungan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga TNBG. ? Membangun kolaborasi yang efektif serta berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan yang sejajar berdasarkan sifat-sifat saling percaya (<i>mutual trust</i>), saling menghargai (<i>mutual respect</i>), saling memberi manfaat (<i>mutual benefit</i>), saling memberdayakan (<i>empowering</i>), berbagi tanggung jawab (<i>sharing responsibility</i>), berbagai wewenang dan peran (<i>sharing of power and role</i>), berbagi pengetahuan, keterampilan, praktek terbaik dan sumberdaya (<i>sharing of knowledge, skills, best practices and resources</i>), berbasis pendekatan keseimbangan ekosistem (<i>ecosystem approach</i>) dan sinergisitas sesuai dengan rencana pengelolaan TNBG yang telah disepakati oleh para pihak. ? Percepatan pengukuhan batas kawasan hutan TNBG serta zonasi kawasan. ? Menyediakan berbagai kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan daerah penyangga khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.	Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara)	<ul style="list-style-type: none"> ? Bersama-sama dengan Tim Kolaborasi lainnya dalam menemukan ekonomi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ? Bersama-sama dengan Balai TNBG melakukan percepatan dalam pengukuhan kawasan TNBG.

3.	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal)	<ul style="list-style-type: none"> ? Bersama-sama dengan Tim Kolaborasi lainnya dalam menemukan ekonomi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ? Melakukan koordinasi seluruh instansi yang terkait pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam membantu mewujudkan kepentingan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya terutama dalam peningkatan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil (pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain) yang dimiliki oleh masyarakat. ? Bersama-sama dengan Balai TNBG melakukan percepatan dalam pengukuhan kawasan TNBG.
4.	Balai TNBG	<ul style="list-style-type: none"> ? Bersama-sama dengan Tim Kolaborasi lainnya dalam menemukan ekonomi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ? Penyedia berbagai kebijakan-kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan TNBG yang berkelanjutan. ? Menemukenali berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kaitannya dengan masalah lahan yang selama ini di gunakan oleh masyarakat sehingga dalam pengembangan ekonomi alternatif dapat dioptimalkan fungsi lahan tersebut. ? Mengupayakan penyelesaian tata batas kawasan TNBG.
5.	Bitra Konsorsium (NGO)	<ul style="list-style-type: none"> ? Sebagai lembaga mitra strategis pemerintah untuk memperkuat pengelolaan TNBG dan pengembangannya melalui pengembangan ekonomi alternatif. ? Mitra pemerintah dalam melakukan kajian kritis dan penemuan alternatif pemecahan masalah dalam bentuk rekomendasi konstruktif sebagai upaya untuk memadukan berbagai kepentingan dalam pengembangan ekonomi alternatif ? Melakukan upaya penggalian dana tambahan jangka panjang bagi kesinambungan pengembangan ekonomi alternatif yang ada ? Pembinaan partisipasi masyarakat melalui peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan lingkungannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat terutama upaya pencapaian keberlanjutan pengembangan ekonomi alternatif yang dilakukan

6.	Organisasi Konservasi Rakyat (OKR)	<ul style="list-style-type: none"> ? Pembinaan partisipasi masyarakat melalui peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan lingkungannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat terutama upaya pencapaian keberlanjutan pengembangan ekonomi alternatif yang dilakukan ? Sebagai sarana berkomunikasi efektif dengan masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan sehingga program dan kebijakan pengelolaan TNBG dapat disinergikan dengan masyarakat di sekitar kawasan ? Sebagai arena pelatihan-pelatihan sekaligus sebagai media masyarakat dalam berkonsultasi serta bertukar pengalaman dalam pengambilan keputusan kolektif. ? Sebagai sarana transformasi pemikiran dan program dalam peningkatan kemandirian masyarakat terutama dalam menemukan ekonomi alternatif yang dapat meminimalisasi ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan
7.	Tokoh-Tokoh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ? Sebagai mitra Pemerintah dan Bitra Konsorsium (NGO) serta OKR dalam memfungsikan seluruh peran untuk menciptakan kebersamaan di tingkat masyarakat. ? Media konsultasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi alternatif serta memupuk keterlibatan dalam pengembangan ekonomi alternatif yang akan dilaksanakan.
8.	KSU Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> ? Berperan dalam mengelola setiap bantuan dana bergulir baik yang diberikan oleh NGO maupun pemerintah ? Sarana masyarakat di daerah penyangga TNBG melalui OKR melakukan pinjaman dana apabila kebutuhannya sangat mendesak. ? Untuk jangka panjang diharapkan berperan menjadi sarana transaksi simpan pinjam yang selalu berkoordinasi dengan OKR.
8.	Lembaga Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> ? Berperan dalam menemukan berbagai ekonomi alternatif yang layak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan karakteristik lokal ? Melakukan berbagai kajian-kajian terutama dalam menemukan ekonomi alternatif yang terdapat di kawasan TNBG dan layak untuk dikembangkan pada lahan milik masyarakat sehingga ikatan emosional masyarakat dalam pelestarian kawasan TNBG dapat terselenggara.

Saran Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si.

- 1. Rekap atas catatan seluruh penguji dan pembimbing (seperti di atas)**
- 2. Perbaiki Saran**

Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap usaha ekonomi alternatif yang dapat dimanfaatkan dari kawasan hutan TNBG yang layak (baik teknis maupun ekonomi) dilakukan di luar kawasan (lahan milik masyarakat), misalnya pembudidayaan rotan, penangkaran berbagai jenis satwa, ekowisata dan yang lainnya. Di samping itu perlu juga dilakukan penelitian mengenai strategi pengembangan daerah penyangga TNBG dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan TNBG yang berkelanjutan.

Saran Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D

- 1. Edit kembali terjemahan abstrak (sudah dilakukan sesuai perbaikan)**
- 2. Bab II bagian E supaya dijelaskan tersendiri (dilakukan pembahasan mengenai Taman Nasional dan Daerah Penyangga pada latar belakang)**
- 3. Penjelasan konsep “Ekonomi Alternatif”**

Ekonomi alternatif merupakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh Bitra Konsorsium sebagai upaya untuk mengurangi/meminimalisasi aktivitas masyarakat yang merusak hutan seperti berburu, mengambil rotan dan pembalakan kayu di hutan, yang dialihkan ke kegiatan ekonomi yang berbasis konservasi dan bertujuan untuk mendukung TNBG. Pengembangan ekonomi tersebut merupakan bagian dari usaha yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, hanya model pengembangannya lebih diupayakan untuk memberikan hasil yang maksimal.

- 4. Analisis tentang dampak kegiatan pada lingkungan/ekologi, telah dibahas seperti yang disarankan oleh Bapak Sumbangan Baja.**